

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah di tingkat daerah memiliki peran yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat dalam hal kualitas jasa yang menjadi pusat layanan bagi masyarakat. Perubahan lingkungan yang terus berlangsung sangat cepat mengharuskan setiap organisasi untuk dapat dengan cepat dan tepat beradaptasi dengan perubahan dengan secara cerdas menerapkan berbagai metode pengelolaan organisasi sesuai dengan pengelolaan sumber-sumber ekonomis erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan, yang merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan. Kepercayaan dan kepuasan masyarakat menjadi tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, artinya masyarakat harus bisa terlayani dengan baik.

Peraturan atau ketentuan tentang penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan Undang-Undang terbaru yaitu Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Pelayanan Publik ini diterbitkan dengan harapan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan terjaminnya kepastian hak dan kewajiban serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-Undang Pelayanan publik ini juga memberikan sanksi bagi pelaksanaan dan penyelenggara pelayanan publik yang tidak memenuhi

ketentuan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan tentang sanksi ini menunjukkan tingginya tuntutan untuk memenuhi harapan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang baik dari para penyelenggara pelayanan publik. Sisi lain hasil survey yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 22 pemerintah kota di Indonesia masih sangat buruk, Kompas (2011)

Dalam pelaksanaan pelayanan public yang diberikan kemasyarakat menggunakan dana dan diperlukan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena dana yang digunakan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja, maka konsep pengukuran kinerja secara finansial (keuangan) juga perlu dilakukan. Kinerja keuangan dapat menunjukkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah serta kemampuan pemerintah dalam menggunakan dana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan data sebuah laporan keuangan, sedangkan laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah diharuskan meningkatkan pengelolaan keuangan menjadi lebih berkualitas. Dan kinerja pemerintah perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemajuan dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah atau pengukuran kinerja dalam mengelola keuangan negara adalah dengan melakukan analisis *Value For Money*. Hasil analisis metode

*Value For Money* atau pengukuran kinerja ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai keekonomisan keuangan pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan negara, pembangunan negara, mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan dan mengukur efisiensi belanja, serta mengukur sejauh mana kinerja keuangan dari pertumbuhan pendapatan dan belanja tiap tahunnya. Dengan implementasi *value for money* diyakini dapat dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik.

Berkenaan dengan uraian di atas penulis ingin mengetahui di dalam praktik nyata, bagaimana kinerja keuangan di instansi pemerintah dengan menggunakan metode *Value For Money*, oleh karena itu penulis tertarik untuk menyusun Karya Ilmiah yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan dengan Metode *Value For Money* Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 sampai 2012”.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 sampai 2012 sudah ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan metode *value for money*?
2. Apakah kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami perkembangan dari tahun 2010 ke 2012?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### 1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan metode *value for money* tahun 2010 sampai 2012.
- b. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami perkembangan dari tahun ke tahun atau tidak.

#### 2. Manfaat Penulisan

##### a. Bagi Penulis

- 1). Untuk mengetahui kinerja keuangan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- 2). Untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

##### b. Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Hasil penulisan karya ilmiah ini diharapkan menjadi evaluasi dan pertimbangan kebijakan bagi pemerintah dalam mengelola Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun mendatang.

c. Bagi Fakultas

Penulisan karya ilmiah ini dalam perkembangan ilmu pengetahuan dapat dijadikan referensi untuk penulisan karya ilmiah sejenis bagi mahasiswa